



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 375 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN PERANGKAT DAERAH PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terlaksananya reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan, terjadi pengembangan jabatan fungsional pada pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sehingga perlu dilakukan pembinaan jabatan fungsional secara komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier serta peningkatan mutu tugas jabatan fungsional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, maka perlu ditetapkan Perangkat Daerah Pembina Jabatan Fungsional yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi dari jabatan fungsional sebagai instansi pembina jabatan fungsional di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Perangkat Daerah Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perangkat Daerah Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai perwakilan Instansi Pembina Pusat untuk masing-masing jabatan fungsional dan memiliki fungsi dalam rangka mempermudah koordinasi dan penyebaran informasi dalam hal pembinaan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 18 November 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 375 /2025
TANGGAL : 10 November 2025
TENTANG : PENETAPAN PERANGKAT DAERAH PEMBINA
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	PERANGKAT DAERAH PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 2. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur 3. Asesor SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1. Analis Kebencanaan 2. Penata Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
		3. Rescuer	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional)
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Analis Anggaran 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah 3. Analis Pembiayaan dan Resiko Keuangan 4. Analis Perbendaharaan Negara 5. Pembina Teknis Perbendaharaan Negara 6. Penatalaksana Barang 7. Penilai Pemerintah	Kementerian Keuangan
4.	Badan Pendapatan Daerah	1. Asisten Penilai Pajak 2. Asisten Penyuluh Pajak 3. Pelelang 4. Pemeriksa Pajak 5. Penilai Pajak 6. Penyuluh Pajak	Kementerian Keuangan
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Perencana	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanan Pembangunan Nasional
		2. Peneliti	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1. Analis Hukum 2. Penyuluh Hukum 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	PERANGKAT DAERAH PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
7.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Analisis Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
8.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Pustakawan	Perpustakaan Nasional
		2. Arsiparis	Arsip Nasional Republik Indonesia
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Administrator Database Kependudukan 2. Operator Sistem Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)	Kementerian Dalam Negeri
11.	Dinas Kesehatan	1. Pengawas Farmasi dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan
		2. Pengawas Radiasi	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
		3. Apoteker 4. Asisten Apoteker 5. Asisten Penata Anestesi 6. Bidan 7. Dokter 8. Dokter Gigi 9. Dokter Pendidik Klinis 10. Entomolog Kesehatan 11. Epidemiolog Kesehatan 12. Fisikawan Medis 13. Fisioterapis 14. Nutrisi 15. Okupasi Terapis 16. Orthotis Prostetis 17. Pembimbing Kesehatan Kerja 18. Penata Anestesi 19. Penyuluh Kesehatan Masyarakat 20. Perawat 21. perekam Medis 22. Pranata Laboratorium Kesehatan 23. Psikolog Klinis 24. Radiografer	Kementerian Kesehatan

NO	PERANGKAT DAERAH PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
		25. Refraksionis Optisien 26. Sanitarian 27. Teknisi Elektromedis 28. Teknisi Gigi 29. Teknisi Transfusi Darah 30. Terafis Gigi dan Mulut 31. Terafis Wicara 32. Administrator Kesehatan	
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1. Pranata komputer	Badan Pusat Statistik
		2. Statistisi	
		3. Manggala Informatika 4. Sandiman	Badan Siber dan Sandi Negara
		5. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi 6. Asisten Pranata Siaran 7. Asisten Teknisi Siaran 8. Pengendali Frekuensi Radio 9. Penguji Perangkat Telekomunikasi 10. Pranata Hubungan Masyarakat 11. Pranata Siaran 12. Teknisi Siaran	Kementerian Komunikasi dan Informatika
13.	Dinas Lingkungan Hidup	1. Pengawas Lingkungan Hidup 2. Pengendali Dampak Lingkungan 3. Penyuluh Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Penata Ruang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
		2. Pembina Jasa Konstruksi 3. Teknik Jalan dan Jembatan/Penata Kelola Jalan dan Jembatan 4. Teknik Pengairan/Penata Kelola Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum

NO	PERANGKAT DAERAH PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
		5. Teknik Penyehatan Lingkungan/ Penata Kelola Penyehatan Lingkungan 6. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan/ Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman.	
15.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Penata Pertanahan.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
16.	Dinas Sosial	1. Pekerja Sosial 2. Penyuluh Sosial	Kementerian Sosial
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penggerak Swadaya Masyarakat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
18.	Dinas Pendidikan	1. Guru 2. Pamong Belajar 3. Pengawas Sekolah 4. Pengembang Kurikulum 5. Pengembang Penilaian Pendidikan 6. Pengembang Teknologi Pembelajaran 7. Penilik 8. Pranata Laboratorium Pendidikan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Inovasi
19.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	1. Pelatih Olahraga 2. Asisten Pelatih Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga
		3. Pamong Budaya	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Inovasi
20.	Dinas Perhubungan	Penguji Kendaraan Bermotor	Kementerian Perhubungan
21.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan 2. Analis Perdagangan 3. Negosiator Perdagangan	Kementerian Perdagangan

NO	PERANGKAT DAERAH PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
		4. Penera 5. Pengamat Tera 6. Pengawas Kemetrolagian 7. Pengawas Perdagangan 8. Penguji Mutu Barang 9. Penjamin Mutu Produk 10. Pranata Laboratorium Kemetrolagian	
		11. Pembina Industri 12. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 13. Asesor Manajemen Mutu Industri	Kementerian Perindustrian
		14. Pengawas Koperasi	Kementerian Koperasi dan UMKM
22.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Analis Ketahanan Pangan 2. Analis Pasar Hasil Pertanian 3. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian 4. Pengawas Benih Tanaman 5. Pengawas Mutu Hasil Pertanian 6. Pengawas Mutu Pakan 7. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 8. Penyuluh Pertanian 9. Medik Veteriner 10. Pramedik Veteriner 11. Pengawas Bibit Ternak	Kementerian Pertanian
23.	Dinas Perikanan	1. Analis Akuakultur 2. Analis Pasar Hasil Perikanan 3. Analis Inspektur Mutu Hasil Perikanan 4. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 5. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 6. Inspektur Mutu Hasil	Kementerian Kelautan dan Perikanan

NO	PERANGKAT DAERAH PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
		7. Perikanan 8. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 9. Pengawas Perikanan 10. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 11. Teknisi Akuakultur 12. Teknisi Kesehatan Ikan 13. Pengelola Kesehatan Ikan 14. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana 2. Penyuluh Keluarga Berencana	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
25.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1. Instruktur 2. Mediator Hubungan Industrial 3. Pengantar Kerja 4. Pengawas Ketenagakerjaan 5. Penguji keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan
26.	Inspektorat Daerah	1. Auditor	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
		2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	Kementerian Dalam Negeri
27.	Satuan Polisi Pamong Praja	Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri
28.	Badan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1. Analis Kebakaran 2. Pemadam Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri
29.	Sekretariat DPRD	1. Perisalah Legislatif 2. Asisten Perisalah Legislatif	Sekjen DPR RI
30.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Penata Kelola Perizinan	Kementerian Dalam Negeri

NO	PERANGKAT DAERAH PEMBINA	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
		2. Penata Kelola Penanaman Modal	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal


BUPATI BANTUL SELATAN,
EDDY RAY SAMSURI